



News Title : Regulasi Tumpang-tindih Kripto Jadi Bola Liar		
Media Name : Media Indonesia	Journalist : Despian Nurhidayat	
Publish Date : 31 January 2022	Tonality : Positive	
News Page : A3	News Value : 937,440,000	
Resources : Wimboh Santoso (Ketua Dewan Komisiner OJK), Anto Prabowo (Deputi Komisiner Manajemen Strategis dan Logistik OJK), Ibrahim Assuaibi (Direktur TRFX Garuda Berjangka), Nayoko Wicaksono (Komisaris PT Zipmex Exchange Indonesia (Zipmex)), Teguh Kurniawan (CEO Tokocrypto)	Ads Value : 312,480,000	
Section/Rubrication : Fokus	Topic : kripto	

Regulasi Tumpang-tindih Kripto Jadi Bola Liar

DESPIAN NURHIDAYAT
despian@mediaindonesia.com

PERDAGANGAN kripto di Indonesia masih dipenuhi dengan ketidakpastian. Hal itu disebabkan adanya perbedaan regulasi antara para pemangku kepentingan, dalam hal ini Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dari Kementerian Perdagangan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Bappebti sendiri telah memastikan segala transaksi kripto aman dan terlindungi. Mereka telah menetapkan 229 kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto di Indonesia, di antaranya ialah Bitcoin, Ethereum, Tether, XRP/Ripple, Bitcoin Cash, Binance Coin, Polkadot, Cardano, Solana, dan lainnya.

Regulasi terkait aset kripto sendiri tertuang dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.

Selain itu, terdapat 11 perusahaan pedagang aset kripto yang terdaftar di Bappebti, di antaranya PT Indodax Nasional Indonesia (Indodax), PT Crypto Indonesia Berkas (Tokocrypto), PT Zipmex Exchange Indonesia (Zipmex), PT Indonesia Digital Exchange (Idex), PT Pintu Kemana Saja (Pintu), PT Luno Indonesia LTD (Luno), PT Cipta Koin Digital (Koinku), PT Tiga Inti Utama, PT Uppbit Exchange Indonesia, PT Rekeningku Dotcom Indonesia, dan PT Trinitas Investama Berkas.

Di lain pihak, OJK secara tegas melarang lembaga jasa keuangan memfasilitasi perdagangan aset kripto. "OJK dengan tegas melarang lembaga jasa keuangan untuk menggunakan, memasarkan, dan atau memfasilitasi perdagangan aset kripto," ungkap Ketua Dewan Komisiner OJK Wimboh Santoso, Selasa (25/1).

Lebih lanjut, pelarangan itu pun bukan tanpa alasan. OJK menegaskan hal tersebut untuk memastikan penggunaan rekening bank atau yang dapat disamakan dengan hal tersebut, tidak digunakan untuk kegiatan yang patut diduga mengandung unsur penipuan, kegiatan retnir, perjudian, pencucian uang, investasi ilegal, dan/atau yang mengandung skema ponzi.

"OJK mengimbau lembaga/kementerian yang melakukan pengawasan terhadap badan hukum di luar kewenangan OJK yang melakukan usaha simpan pinjam, perdagangan dan/atau investasi yang melibatkan dana masyarakat memastikan rekening bank digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tambah Deputi Komisiner Manajemen Strategis dan Logistik OJK Anto Prabowo.

Anto menegaskan OJK meminta perbankan untuk memastikan rekening bank tidak digunakan untuk menampung dana kegiatan yang

Pemerintah harus membuka ruang diskusi bersama dengan pakar kripto dan blockchain agar dapat memberikan kepastian bagi keberlangsungan perdagangan aset kripto di Indonesia.



melanggar hukum. OJK berpendapat bahwa aset kripto merupakan komoditas yang memiliki fluktuasi nilai yang sewaktu-waktu dapat naik dan turun sehingga masyarakat harus memahami risikonya sebelum melakukan perdagangan aset kripto. OJK juga menyatakan tidak melakukan pengawasan dan pengaturan aset kripto yang pengaturan dan pengawasannya dilakukan Bappebti.

Tidak ada koordinasi

Melihat ketidakpastian itu, Direktur TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi beranggapan bahwa saat ini tidak ada koordinasi yang baik antara OJK, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perdagangan terkait kebijakan yang mengatur mengenai perdagangan aset kripto.

"Tidak ada koordinasi antara OJK, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perdagangan terkait perdagangan kripto, jadi seperti bola liar ini semua," kata Ibrahim.

Tidak adanya koordinasi itu pun lantas menyebabkan kebingungan kepada masyarakat sebab Kemendag melalui Bappebti memperbolehkan perdagangan kripto, tetapi OJK melarang lembaga jasa keuangan untuk memfasilitasi perdagangan aset kripto.

Padahal, menurut Ibrahim, keuntungan dari perdagangan aset kripto juga dapat diperoleh pemerintah yang bersumber dari pajak. Hal itu dibuktikan dengan viralnya Ghozali yang men-

dapatkan keuntungan dari NFT (*non-fungible tokens*) dan diminta untuk membayar pajak. "Pemerintah padahal dapat mengambil keuntungan dari perdagangan kripto ini melalui pajak," ujarnya.

Ibrahim menambahkan jika risiko perdagangan aset kripto dikatakan fluktuatif dalam artian naik dan turunnya transaksi sangat cepat, hal itu juga dikatakan berlaku untuk pasar saham dan perdagangan valas.

"Dalam transaksi, baik di kripto, valas dan pasar saham, kan, juga *high risk* pasti ada risikonya. Tapi, kan, dalam berinvestasi itu ada manajemen risiko dan perjanjian amanat bahwa masyarakat yang melakukan ini harus tahu risikonya," tutur Ibrahim.

Ibrahim berpendapat bahwa pernyataan yang dilontarkan OJK merupakan bentuk kekhawatiran agar masyarakat tidak mengalami kerugian besar. Namun, menurutnya, OJK belum memahami transaksi apa saja yang biasa dilakukan masyarakat terkait perdagangan aset kripto ini.

Dia menegaskan bahwa saat ini, masyarakat Indonesia kebanyakan membeli aset kripto bernilai rendah, tidak seperti *bitcoin* yang memiliki harga beli sangat tinggi. "Masyarakat Indonesia enggak mungkin beli *bitcoin* yang satu koinnya itu Rp900 juta. Jadi, mereka carinya koin yang rendah berkisar Rp1 juta sampai Rp2 juta per koin. Yang dikejar masyarakat yang seperti ini," tegasnya.

"Saya melihat OJK hanya memperingatkan dan memberikan kewaspadaan, tapi yang dijadikan patokan oleh OJK, yaitu Bitcoin, yang harganya tinggi dan turunnya sangat dalam pada hari ini dan memberikan kerugian," sambung Ibrahim.

Ruang diskusi

Komisaris PT Zipmex Exchange Indonesia (Zipmex) Nayoko Wicaksono meminta pemerintah membuka ruang diskusi agar lebih mengerti tentang ekosistem perdagangan aset kripto. Hal itu harus dilakukan karena saat ini pemerintah terkesan memiliki regulasi yang bertabrakan terkait aset kripto.

"Kalau di luar negeri itu, regulasinya lebih banyak *communication and hearing* untuk lebih mengerti (aset kripto) karena, kanc kripto itu *something* yang enggak gampang untuk dimengerti karena *underlying* teknologinya *blockchain*. Jadi, harus lebih ada *education or workshop* ke pemerintah, apalagi dari penggunaan datanya juga," ujarnya, Rabu (26/1).

Lebih lanjut, pemerintah dikatakan harus membuka ruang diskusi bersama dengan pakar kripto dan *blockchain* agar dapat memberikan kepastian bagi keberlangsungan perdagangan aset kripto di Indonesia.

Pasalnya, Nayoko memperkirakan bahwa perdagangan aset kripto akan berlangsung dalam kurun waktu yang lama. Hal itu terlihat dari jumlah masyarakat yang sudah bertransaksi dalam perdagangan aset kripto.

"Karena kripto sendiri di 2021 menghasilkan *financial inclusivity* ke lebih dari 10 juta orang di Indonesia. Sementara itu, yang *trading* saham di Indonesia saja cuma mencapai 3,5 juta selama bertahun-tahun. Jadi, kripto kayaknya enggak bakal go *away*, sih," ucap Nayoko.

Dia berharap pemerintah, dalam hal ini Bappebti dan OJK, dapat bersinergi untuk memberikan regulasi yang jelas dan tidak saling bertabrakan.

Chief Operating Officer PT Crypto Indonesia Berkas (Tokocrypto) Teguh Kurniawan menegaskan bahwa pihaknya selalu berupaya mendukung masyarakat tentang kehati-hatian dalam berinvestasi aset kripto.

Di samping itu, pihaknya juga menyambut baik diskusi dengan semua *stakeholder* terkait dan terus berkontribusi untuk membangun pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika yang lebih luas tentang manfaat industri aset kripto yang sehat.

"Setiap produk investasi pasti memiliki risiko tersendiri. Semakin tingginya potensi keuntungan, akan diikuti dengan semakin tingginya tingkat risiko, begitupun sebaliknya. Hal ini berlaku di semua investasi, termasuk aset kripto," pungkas Ketua Umum Aspakindo (Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia) itu. (E-3)

